



BISA!

BERINTEGRITAS, INOVATIF, SANTUN, AKUNTABEL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II



LAPORAN

PENGAWASAN & PEMBINAAN BIDANG

TRIWULAN III

2025

- Jl. Awang Long No. 69
Kota Bontang
Kalimantan Timur
Kode Pos 75311
- (0548) 23001
- 0813-5125-6098
- kantor.pabontang@gmail.com
- pa-bontang.go.id
- @pengadilanagamabontang
- Pengadilan Agama Bontang



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 418/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan program kerja dan peraturan yang berlaku, maka perlu membentuk kembali Tim Pengawasan Hawasbid di Pengadilan Agama Bontang yang baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Subbagian dan seluruh aparatur sipil negara lainnya;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dimaksud, maka perlu ditunjuk Hakim-Hakim Pengawas dan Pembina Bidang yang bertugas membantu Ketua Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- d. bahwa Badan Pengawas Mahkamah Agung RI telah memberlakukan Aplikasi WASTITAMA untuk pengawasan Hakim Pengawas Bidang dan demikian pula Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama telah memberlakukan e-Binwas, maka Surat Keputusan tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang perlu diubah dan diperbarui;
- e. bahwa Hakim yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
5. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA 145/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 13/BP/SK/11/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tentang Penggunaan Aplikasi WASTITAMA;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (e-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor : 625/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/XI/2024 tentang Penunjukan Hakim



- Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas dan Pembina Bidang pada Pengadilan Agama Bontang dengan bidang pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Hakim Pengawas Bidang dimaksud sebagai berikut:
1. Koordiantor Hakim Pengawas dan Pembina Bidang:
 - Membuat surat tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada para hakim pengawas bidang pada minggu pertama setiap awal bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember;
 - Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun;
 - Mengunggah surat tugas dan jadwal pembinaan dan pengawasan rutin tersebut ke dalam Aplikasi e-Binwas setiap triwulan menjelang pelaksanaan pengawasan;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap triwulan sesuai dengan bidang yang telah ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 - Membuat laporan hasil rekapitulasi pengawasan dan pembinaan hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
 2. Hakim Pengawas dan Pembina Bidang
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap triwulan sesuai dengan bidang yang telah ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 - Menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan setiap triwulan dilakukan pada setiap awal bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus dan bulan November tahun berjalan;
 - Melaporkan hasil rekapitulasi pembinaan dan pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Setiap hakim pengawas bidang selain membuat laporan hasil pengawasannya juga wajib mengunggah hasil pengawasannya ke dalam Aplikasi e-Binwas dan Aplikasi WASTITAMA setiap akhir triwulan;
- KELIMA : Setiap hakim pengawas bidang membuat pengawasan dan pembinaan setiap bulan yang hasil pengawasannya wajib diunggah ke dalam Aplikasi Kinsatker;
- KEENAM : Menunjuk Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Bontang untuk menatausahakan hasil rekapitulasi hasil pengawasan hakim bidang setiap triwulan, mengunggahnya ke dalam website resmi Pengadilan Agama Bontang, dan mengirimnya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai laporan;



KETUJUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 30 Juni 2025
**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG,**



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Hatibinwasda untuk Pengadilan Agama Tinggi Samarinda di Samarinda;
3. Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 418/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

NO.	NAMA HAKIM	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	1. Koordinator Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan jadwal pengawasan berjalan sesuai rencana - Memastikan temuan hasil pengawasan tidak berulang; - Memastikan setiap hasil temuan ditindaklanjuti sesuai waktu yang telah ditetapkan
2.	Rifqi Akbari, S.H.	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan: <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen kepegawaian - Tata kelola organisasi - Keuangan Dipa 01 dan Dipa 04 - Tata kelola barang milik negara - Pengadaan barang dan jasa - Tata kelola persuratan - Pengelolaan perpustakaan - Sarana dan prasarana - Perencanaan dan TI - Akuntabilitas SAKIP
3.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan perkara - Keuangan perkara - Pelaporan perkara - Kearsipan perkara - Tata kelola administrasi perkara elektronik tingkat pertama dan banding 2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan: <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan persidangan - Pemanggilan para pihak - Persidangan dan berita acara sidang - Mediasi (manual dan elektronik) - Putusan dan anonimisasi - Pemberitahuan isi putusan - Minutasi dan akta cerai
4.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Hakim	1. Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan: <ul style="list-style-type: none"> - Program kerja, visi dan misi - Struktur organisasi - Uraian tugas dan wewenang - Proses penyusunan RKA-KL - Rapat koordinasi - Evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan - Pengawasan dan pembinaan - Pemantauan dan evaluasi/tindak lanjut



			<p>2. Hakim Pengawas Manajemen Pengadulan dan Kinerja Pelayanan Publik:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar layanan dan pelayanan publik- Sistem Informasi dan evaluasi terhadap kualitas informasi pelayanan publik- Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan- Keterpenuhan <i>evidence</i> pembangunan zona integritas
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN





MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

JALAN AWANG LONG, NO. 69, BONTANG

SITUS : <http://pa-bontang.go.id/> SUREL : kantor.pabontang@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor 519/KPA.W17-A6/ST.HK.1.2.5/VIII/2025

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 418/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler, perlu menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler;

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

MENUGASKAN:

No	Hawasbid	Jenis Bidang
1	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. 199908192022032005 Hakim	Bidang Manajemen Peradilan
2	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. 199303262022031009 Hakim	Bidang Administrasi Perkara
3	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. 199303262022031009 Hakim	Bidang Administrasi Persidangan
4	Rifqi Akbari, S.H. 199509212022031006 Hakim	Bidang Administrasi Kesekretariatan

No	Hawasbid	Jenis Bidang
5	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. 199908192022032005 Hakim	Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

- Untuk :
1. Melaksanakan pengawasan bidang triwulan III tahun 2025 sesuai waktu yang telah ditetapkan;
 2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum;
 3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 7 (tujuh) hari, mulai hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2025;
 4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bontang, hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Nip. 19780405.200912.1.001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.
NIP : 197405071994031002
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Bontang

Nama : Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP : 198501172006041001
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Bontang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP : 197804052009121001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal Senin, 04 Agustus 2025 dan selambat-lambatnya tanggal Kamis, 14 Agustus 2025.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Senin, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Nor Hasanuddin, Lc., M.A.


Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.


Yuri Adi Dharma, S.Kom.

**LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA BONTANG**

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 418/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2025 tanggal Senin, 30 Juni 2025 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Bontang tanggal Jum'at, 01 Agustus 2025 s/d Jum'at, 08 Agustus 2025

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi

Jabatan yang kosong belum diusulkan

Kriteria

- 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 132;
- 2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Sekretariat di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Lampiran 1;
- 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan

Sebab

Belum adanya pengusulan dari tim baperjakat untuk jabatan yang kosong

Akibat

Jabatan Kosong dan Tupoksi tidak berjalan dengan sempurna

Rekomendasi

Pengusulan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan tertentu.

Tindak Lanjut

Telah diusulkan Ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Rapat Tim Baperjakat Pengadilan Agama Bontang untuk mengisi kekosongan jabatan.

B. ADMINISTRASI PERKARA**1. Kondisi**

Dalam pelaksanaan layanan di PTSP, terjadi penumpukan masyarakat saat pengisian survei pelayanan publik terutama menjelang jadwal sidang. banyaknya pengguna yang datang secara bersamaan menyebabkan meja pelayanan menjadi padat dan suasana kurang kondusif.

Kriteria

KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Angka VIII huruf A

Sebab

Proses pengisian survei yang bersamaan dengan waktu konsultasi membuat petugas kesulitan membagi fokus antara mengarahkan responden dan memberikan informasi pelayanan perkara.

Akibat

kondisi tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai prosedur teknis aplikasi e-court sehingga menyebabkan munculnya tidak kesesuaian dalam pengunggahan dokumen terkait administrasi persidangan secara elektronik.

Rekomendasi

Pengguna layanan diberikan kupon untuk mengisi survei pada waktu yang lebih fleksibel. masyarakat dapat mengisi survei saat menunggu atau setelah sidang, sehingga tidak terjadi penumpukan di meja pelayanan. Dengan cara ini, petugas bisa lebih fokus menyampaikan informasi, terutama terkait administrasi e-court.

Tindak Lanjut

Kupon survei telah dilaksanakan sehingga mengurangi penumpukan di meja pelayanan. Sehingga petugas lebih maksimal dalam memberikan informasi terkait administrasi e-Court.

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN**1. Kondisi**

Pengunggahan bukti tambahan dalam persidangan elektronik belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku,.

Kriteria

Pasal 24 dan Pasal 25 Perma 1 tahun 2019 sebagaimana diubah oleh Perma 7 tahun 2022

Sebab

terbatasnya pemahaman sebagian pengguna terhadap prosedur teknis dalam penggunaan aplikasi e-court. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap tata cara pengunggahan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku juga belum sepenuhnya optimal.

Akibat

Terlambatnya pemeriksaan alat bukti, perlunya klarifikasi tambahan oleh majelis hakim, serta potensi terhambatnya pencapaian asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Rekomendasi

Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengunggahan bukti elektronik, serta menugaskan petugas pendamping di PTSP untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh pengguna.

Tindak Lanjut

Sudah dilaksanakan pendampingan kepada para pihak oleh petugas PTSP dalam mengunggah bukti tambahan.

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**1. Kondisi**

Pada saat dilakukan pengawasan bidang administrasi kesekretariatan, ditemukan bahwa terdapat 3 (tiga) orang hakim yang baru dilantik belum melakukan pelaporan LHKPN awal melalui sistem e-LHKPN sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Kriteria

1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 Tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya.

Sebab

- Ketiga hakim tersebut sebelumnya menjabat sebagai Analisis Perkara Peradilan (klerek) yang tidak termasuk wajib lapor LHKPN, sehingga belum terbiasa dan belum memahami kewajiban tersebut- Kealpaan pegawai kesekretariatan dalam melakukan reminder kewajiban pelaporan LHKPN awal setelah pengangkatan

Akibat

pelaporan LHKPN tidak transparan dan akuntabel dan berpotensi menghambat jenjang karir karena merupakan kelengkapan fit dan proper test

Rekomendasi

Agar segera dilengkapi dan di kawal proses pelaporan LHKPN pegawai

Tindak Lanjut

hakim yang baru dilantik telah melakukan pelaporan LHKPN

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK**1. Kondisi**

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Sebab

Tim Pengelola Website belum menautkan video profil pengadilan pada tampilan halaman depan website Pengadilan Agama Bontang

Akibat

Pengunjung website tidak dapat mengakses video profil pengadilan secara langsung melalui website pengadilan.

Rekomendasi

segera tautkan video profil pengadilan yang ada di youtube pengadilan ke website pengadilan

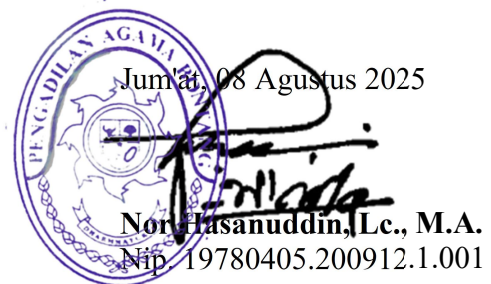
Tindak Lanjut

Telah ditautkan video profil pada Website Pengadilan Agama Bontang

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Bontang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Jumat, 08 Agustus 2025



Non Hasanuddin, Lc., M.A.
Nip. 19780405.200912.1.001

LAMPIRAN

EVIDEN

Jenis Temuan: Jabatan yang kosong belum diusulkan

The screenshot displays the SIMTEPA web application interface. The main content area shows a map of Bontang with a data popup for 'Pengadilan Agama Bontang, Kelas II, Tipe A'. The popup lists the following positions and counts:

Posisi	Jumlah
Ketua	1 Orang
Wakil	0 Orang
Hakim	3 Orang
Panitera	1 Orang
Wakil Panitera	0 Orang
Panitera Muda Hukum	1 Orang
Panitera Muda Gugatan	0 Orang
Panitera Muda Permohonan	0 Orang
Panitera Pengganti	0 Orang
Jurusita	0 Orang
Jurusita Pengganti	2 Orang

The positions 'Wakil', 'Panitera Muda Gugatan', 'Panitera Muda Permohonan', and 'Panitera Pengganti' are marked as 'Tidak Usulkan' (Not Proposed) in red text. The total number of cases for the year 2024 is 447.

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. All right reserved. Version 2.7.2

EVIDEN

Jenis Temuan: Telah dilakukan rapat oleh tim baperjakat untuk pengusulan Jabatan yang kosong



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 - WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

Nomor : 533/KPA.W17-A6/KP4.1.3/VIII/2025
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Usulan Panitera Muda Gugatan
di Pengadilan Agama Bontang

Bontang, 8 Agustus 2025

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Di-
Tempat

Assalamualaikum wr, wb.

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Baperjakat Pengadilan Agama Bontang Nomor : 530/KPA.W17-A6/KP4.1.3/VIII/2025, tanggal 8 Agustus 2025, Perihal Permohonan Usulan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bontang dan untuk selanjutnya, kami bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk meneruskan pengajuan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung:
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Nor Hasanuddin
NIP 197804052009121001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



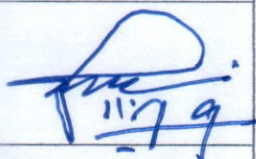
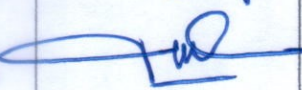
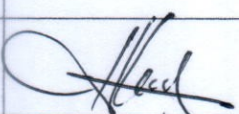
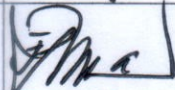
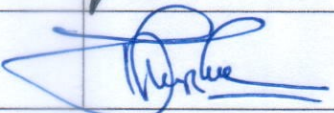
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 - WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	2 /1/2018	10/9/2020	10/9/2020

Jenis Kegiatan : (Rapat)
Nama Kegiatan : Rapat Baperjakat Usulan Panmud Gugatan
Hari, Tgl. : Jum'at, 8 Agustus 2025
Waktu : 08.00 Wita Sampai Selesai
Tempat : Ruang Rapat

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	NOR HASANUDDIN, Lc., M.A.	KETUA BAPERJAKAT/ANGGOTA	
2.	FATHUL MAJID, S.H.I.	SEKRETARIS BAPERJAKAT/ANGGOTA	
3.	AKHMAD FARIZ ABROR FITRIADI, S.H.I.	ANGGOTA	
4.	FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.,	ANGGOTA	
5.	YURI ADI DHARMA, S.Kom.	ANGGOTA	

Keterangan : *) coret yang tidak perlu



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

Nomor : 528/KPA.W17-A6/UND.KP3.4/VIII/2025 Bontang, 7 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Hal : Rapat Baperjakat

Yth :

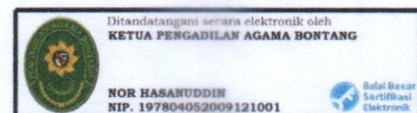
1. Sekretaris Baperjakat dan Anggota Baperjakat Pengadilan Agama Bontang;

Dalam rangka rapat Baperjakat terkait pengusulan Panitera Muda Gugatan, maka diharapkan kehadiran Sekretaris Baperjakat dan Anggota Baperjakat untuk hadir dengan agenda sebagaimana dimaksud di bawah yang dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 8 Agustus 2025
Pukul : 08.00 s.d selesai
Agenda : Usulan Panitera Muda Gugatan
Tempat : Media Center Pengadilan Agama Bontang

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 - WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

**BERITA ACARA
RAPAT TIM BAPERJAKAT
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Nomor : 529/KPA.W17-A6/KP4.1.3/VIII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh lima, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Bontang bertempat di ruang Ketua yang dihadiri oleh:

Tanda Tangan

1. Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
Ketua merangkap Anggota
2. Fathul Majid, S.H.I.
Sekretaris
3. Akhmad Fariz Abrori Fitriadi, S.H.I.,
Anggota
4. Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.,
Anggota
5. Yuri Adi Dharma, S.Kom
Anggota

Dalam rapat Baperjakat disampaikan, bahwa di Pengadilan Agama Bontang terjadi kekosongan jabatan Panitera Muda Gugatan, maka dengan adanya kekosongan jabatan tersebut Tim Baperjakat bermaksud untuk mengusulkan kekosongan jabatan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Kemudian rapat Baperjakat dilanjutkan untuk mendengarkan pendapat dan pandangan para Anggota Baperjakat yang hasilnya sebagai berikut:

1. Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Ketua Merangkap Anggota)

Menyetujui agar permohonan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bontang secepatnya diisi agar membantu tugas Panitera dan kalau memungkinkan agar

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengirimkan Panitera Pengganti dari Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama lain untuk diperbantukan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

2. Fathul Majid, S.H.I. (Sekretaris merangkap Anggota)

Menyetujui agar permohonan Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti serta Jusrita di Pengadilan Agama Bontang secepatnya diusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda agar pekerjaan pada ke Paniteraan lebih maksimal dan Panitera tidak lagi menjadi Plt. Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.

3. Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. (Anggota)

Menyetujui agar secepatnya mengusulkan permohonan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bontang ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan tidak hanya itu, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti dan juga Jusritapun harus segera diusulkan karena selama ini jabatan tersebut juga mengalami kekosongan;

4. Faidil Anwar, S.Ag., S.H, M.H. (Anggota)

Menyetujui agar permohonan Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti serta Jusrita di Pengadilan Agama Bontang secepatnya diusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda agar pekerjaan pada ke Paniteraan lebih maksimal dan Panitera tidak lagi menjadi Plt. Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.

5. Yuri Adi Dharma, S.Kom. (Anggota)


Menyetujui agar permohonan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bontang secepatnya diusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan harapannya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secepatnya merespon permohonan tersebut.

Dengan hasil sebagaimana tertera pada masing-masing Anggota Tim Baperjakat di atas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP 197804052009121001

Bontang, 8 Agustus 2025
Sekretaris

Fathul Majid, S.H.I.
NIP 19810807 201212 1 002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

Nomor : 530/KPA.W17-A6/KP4.1.3/VIII/2025 Bontang, 8 Agustus 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Rekomendasi Hasil
Tim Baperjakat di Pengadilan Agama Bontang

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Bontang
Di-

Tempat

Assalamualaikum wr, wb.


Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Baperjakat Pengadilan Agama Bontang yang telah dilaksanakan pada Jum'at tanggal delapan bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh lima Nomor : 529/KPA.W17-A6/KP4.1.3/VIII/2025 tentang permohonan pengusulan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bontang ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada dasarnya seluruh anggota Baperjakat menyetujui permohonan pengusulan jabatan tersebut.

Hasil rapat Tim Baperjakat merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk menyetujui permohonan pengusulan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bontang tersebut.

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Baperjakat,


Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP 197804052009121001

**FOTO RAPAT BAPERJAKAT USULAN PANITERA MUDA PADA
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TANGGAL 8 AGUSTUS 2025**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311 www.pa-bontang.go.id, kantor.pabontang@gmail.com

**EVIDEN
TEMUAN ADMINISTRASI PERKARA**



Gambar 1
Penumpukan pelayanan padat dan tidak Kondusif.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311 www.pa-bontang.go.id, kantor.pabontang@gmail.com

BEFORE



Gambar 1

Penumpukan pelayanan padat dan tidak Kondusif.

AFTER



Gambar 2

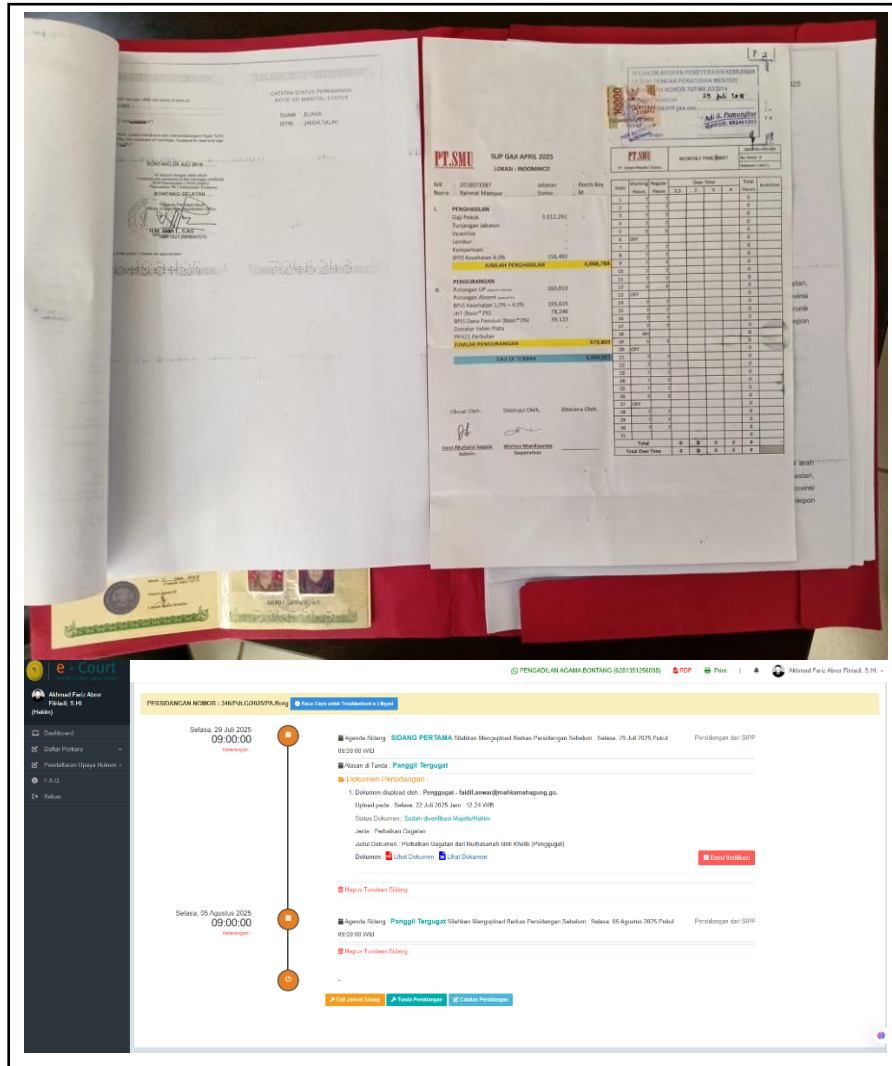
Penggunaan Kupon untuk mengurangi kepadatan pelayanan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311 www.pa-bontang.go.id, kantor.pabontang@gmail.com

**EVIDEN
TEMUAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN**



Gambar 1

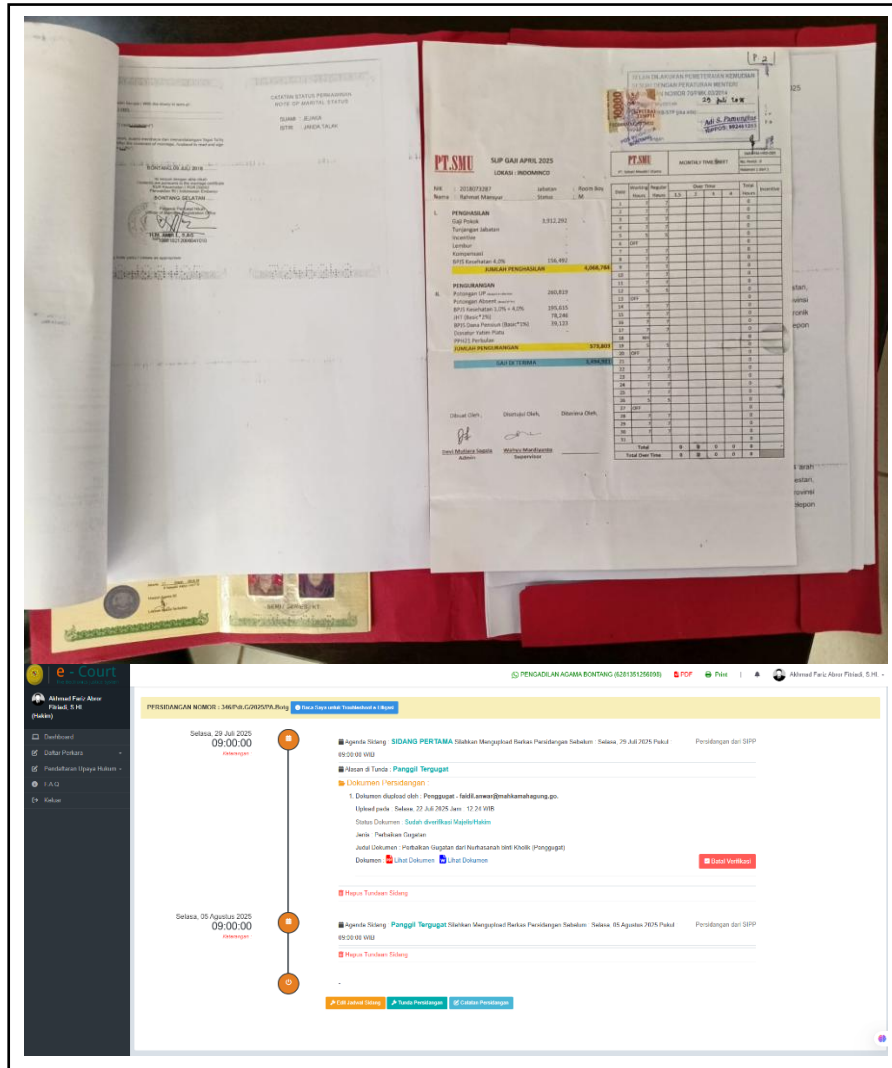
Bukti Tambahan belum diunggah pada aplikasi e-Court.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311 www.pa-bontang.go.id, kantor.pabontang@gmail.com

BEFORE



Gambar 1

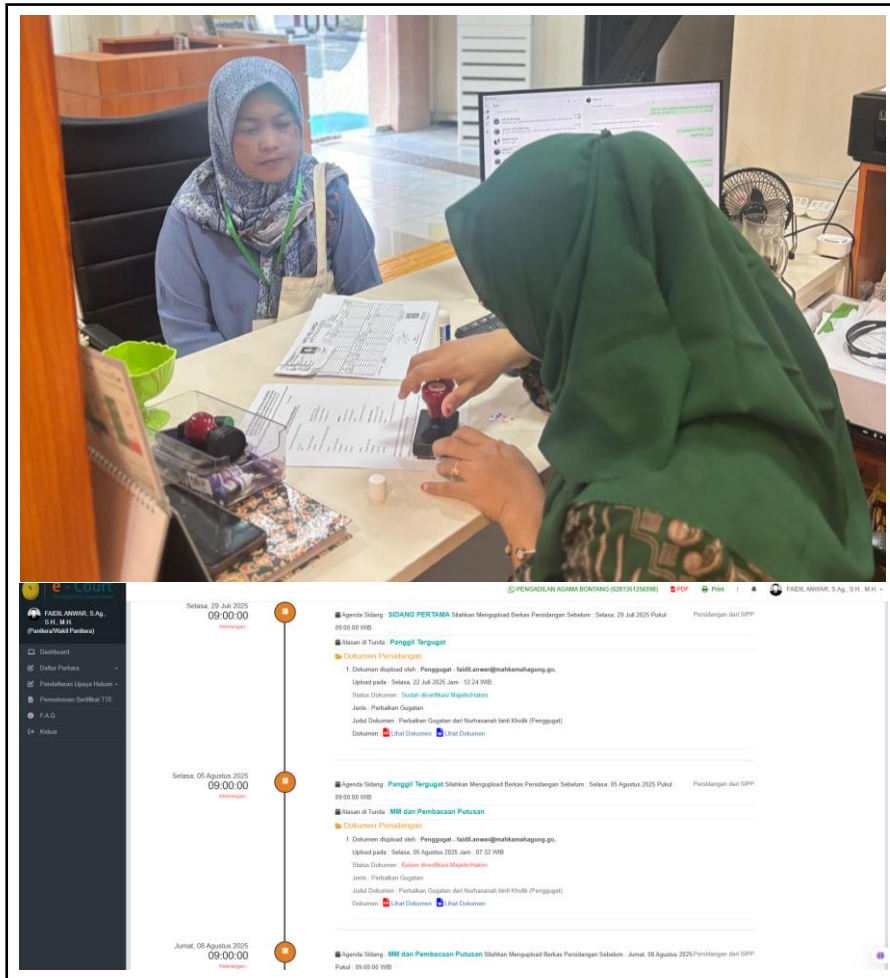
Bukti Tambahan belum diunggah pada aplikasi e-Court.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Kalimantan Timur 75311 www.pa-bontang.go.id, kantor.pabontang@gmail.com

AFTER



Gambar 2

Bukti Tambahan telah distempel dan diunggah pada aplikasi e-Court.

Sebelum

LHKPN belum diajukan oleh 3 (tiga) orang hakim baru

The screenshot shows the SIKEP user interface for Rifqi Akbari, S.H. The user is a Hakim Pengadilan Agama Bontang, Penata Muda (III/a), born on 21 September 1995 in Balikpapan. The interface displays a table of LHKPN/LHKASN reports for the years 2022, 2023, and 2024. All reports are marked as 'Tervalidasi' (Validated).

NO	TAHUN	STATUS PELAPORAN	TANGGAL KIRIM LAPORAN	STATUS VALIDASI	AKSI
1	2024	Diumumkan	20 Januari 2025	Tervalidasi	[Icons]
2	2023	Sudah Lapor - Tepat	04 Januari 2024	Tervalidasi	[Icons]
3	2022	Terverifikasi Lengkap	03 Januari 2023	Tervalidasi	[Icons]

The screenshot shows the SIKEP user interface for Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. The user is a Hakim Pengadilan Agama Bontang, Penata Muda (III/a), born on 19 Agustus 1999 in Malang. The interface displays a table of LHKPN/LHKASN reports for the years 2022, 2023, and 2024. All reports are marked as 'Tervalidasi' (Validated).

NO	TAHUN	STATUS PELAPORAN	TANGGAL KIRIM LAPORAN	STATUS VALIDASI	AKSI
1	2024	Sudah Lapor - Tepat	20 Januari 2025	Tervalidasi	[Icons]
2	2023	Sudah Lapor - Tepat	02 Januari 2024	Tervalidasi	[Icons]
3	2022	Sudah Lapor - Tepat	30 Januari 2023	Tervalidasi	[Icons]

The screenshot shows the SIKEP user interface for Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H. The user is a Hakim Pengadilan Agama Bontang, Penata Muda (III/a), born on 26 Maret 1993 in Malang. The interface displays a table of LHKPN/LHKASN reports for the years 2022, 2023, and 2024. All reports are marked as 'Tervalidasi' (Validated).

NO	TAHUN	STATUS PELAPORAN	TANGGAL KIRIM LAPORAN	STATUS VALIDASI	AKSI
1	2024	Sudah Lapor - Tepat	13 Januari 2025	Tervalidasi	[Icons]
2	2023	Sudah Lapor - Tepat	05 Januari 2024	Tervalidasi	[Icons]
3	2022	Sudah Lapor - Tepat	06 Februari 2023	Tervalidasi	[Icons]

**HASIL TINDAK LANJUT HAWASBID
KESEKRETARIATAN
TRIWULAN III**



Hanandya Naufi Fatca Shafira <hanandyash@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
Kepada: hanandyash@gmail.com

7 Juli 2025 pukul 12.01

Yth. Sdr HANANDYA NAUFI FATCA SHAFIRA

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HANANDYA NAUFI FATCA SHAFIRA
Jabatan : HAKIM - PENGADILAN AGAMA BONTANG - PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan : 07 Juli 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



IkhtisarHarta-070720251101106099436.docx

63K

Yth. Sdr **AKHMAD FARIZ ABROR FITRIADI**

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIC INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: AKHMAD FARIZ ABROR FITRIADI
Jabatan	: HAKIM - PENGADILAN AGAMA BONTANG - PENGADILAN TINGGI AGAMA : SAMARINDA
Bidang	: YUDIKATIF
Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 07 Juli 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**

Lembar Penyerahan E-Filing LHKPN

1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
Kepada: Rifqiakbari.ra@gmail.com

7 Juli 2025 pukul 13.39

Yth. Sdr RIFQI AKBARI

MAHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RIFQI AKBARI
Jabatan : HAKIM - PENGADILAN AGAMA BONTANG - PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan : 07 Juli 2025

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.


Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

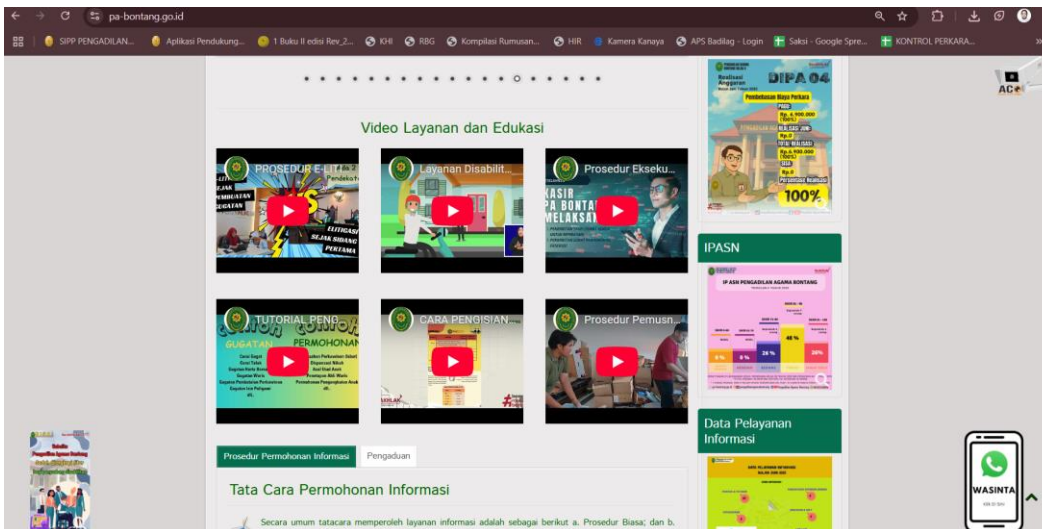
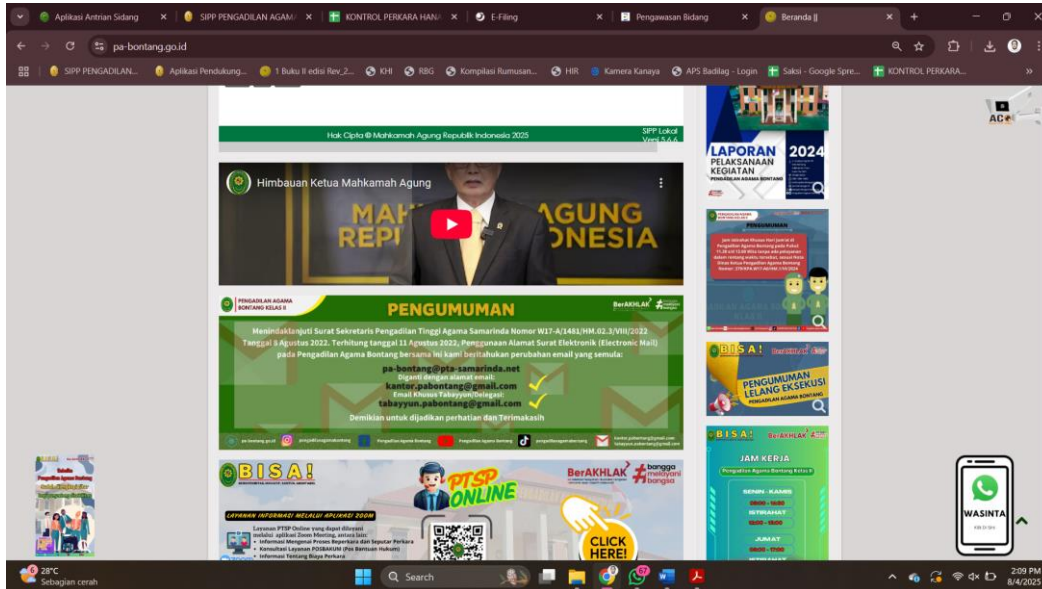
© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

 IkhtisarHarta-070720251239106099442.docx
63K

EVIDEN

Jenis Temuan: Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak ada tautan ke video profil pengadilan)



EVIDEN

Tindak Lanjut: video profil pengadilan sudah ditautkan ke halaman depan website

